

BAB II PENGEMBANGAN HIPOTESIS TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kinerja Perusahaan

Kinerja adalah hasil dari kegiatan atau pekerjaan yang diperoleh suatu organisasi baik organisasi bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu. Adapun definisi kinerja menurut para ahli, yaitu [16]:

1. Kinerja adalah nilai serangkaian perilaku pekerja yang memberikan kontribusi, baik secara positif maupun negatif, pada penyelesaian tujuan organisasi.
2. Kinerja merupakan cara untuk memastikan bahwa pekerja individual atau tahu apa yang diharapkan dari mereka dan mereka tetap fokus pada kinerja efektif dengan memberikan perhatian pada tujuan, ukuran, dan penilaian.
3. Kinerja adalah hasil dari pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan organisasi seperti kualitas, efisiensi, dan kriteria lain dari efektivitas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan merupakan kontribusi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, ukuran, penilaian, kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam suatu perusahaan.

Definisi kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan [17].

Terdapat dua jenis ukuran yaitu ukuran subjektif dan ukuran objektif. Ukuran subjektif biasanya berkaitan dengan profitabilitas yang hasil penjualan produknya dan ukuran subjektif ditentukan oleh persepsi manajer terhadap profitabilitas kegiatan perusahaan [18].

Ukuran kinerja perusahaan dirancang untuk menilai seberapa baik aktivitas dilakukan dan dapat mengidentifikasi apakah apakah telah dilakukan perbaikan yang berkesinambungan. Perusahaan-perusahaan selama ini lebih banyak menggunakan

pengukuran kinerja yang lebih menekankan pada aspek keuangan, yaitu yang sering disebut dengan pengukuran kinerja tradisional. Kinerja tradisional yang diukur hanyalah berkaitan dengan aspek keuangan. Sedangkan pengukuran lainnya seperti: peningkatan kompetensi dan komitmen personil, peningkatan produktivitas dan *cost effectiveness* proses bisnis yang digunakan untuk melayani pelanggan selalu diabaikan oleh manajemen karena sulit dalam pengukurannya. Selama ini pengukuran kinerja perusahaan dilakukan melalui pendekatan tradisional yang menitik beratkan pada sisi keuangan, seperti *gross profit, return equity, operating income* dan sebagainya. Selama ini pengukuran kinerja perusahaan dilakukan melalui pendekatan tradisional yang menitik beratkan pada sisi keuangan, seperti *gross profit, return equity, operating income* dan sebagainya [18].

Dalam penelitian ini menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA) karena rasio ini menunjukkan seberapa besar kontribusi asset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ROA digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset. ROA dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total asset.

ROA dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut [19]:

$$\text{Return On Assest} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \quad (2.1)$$

2.1.2. Pertumbuhan Perusahaan

Pertumbuhan merupakan karakteristik perusahaan yang memfleksikan perkembangan usaha di dalam korporasi. Adanya pertumbuhan di indikasikan dengan peningkatan jumlah penjualan perusahaan antara tahun ini (t) dengan tahun sebelumnya (t-1).

Hubungan antara pertumbuhan dengan *Good Corporate Governance Rating* yaitu peningkatan penjualan yang dianggap sebagai peningkatan kinerja perusahaan. Selain itu dengan adanya peningkatan volume penjualan, maka perusahaan memperoleh tambahan dana dari hasil keuntungan penjualan yang dialokasikan oleh manajemen untuk peningkatan kualitas sumber daya yang berguna untuk pencapaian kinerja yang lebih baik.

Pertumbuhan perusahaan sangat diharapkan oleh seluruh elemen perusahaan baik internal maupun eksternal karena dapat memberikan suatu aspek yang positif bagi perusahaan. dari sudut pemegang saham, pertumbuhan perusahaan menunjukkan prospek yang cerah di masa mendatang dan mereka tentu saja mengharapkan tingkat pengembalian (*rate of return*) dari investasi yang mereka lakukan. Pertumbuhan adalah seberapa jauh perusahaan menempatkan diri dalam sistem ekonomi untuk industri yang sama. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi sebaiknya menggunakan ekuitas sebagai sumber pembiayaannya untuk menghindari biaya keagenan (*agency cost*) dan sebaliknya untuk perusahaan dengan tingkat pertumbuhan rendah, sebaiknya menggunakan hutang sebagai sumber pembiayaannya karena penggunaan hutang akan mengharuskan perusahaan tersebut secara teratur.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perusahaan, yaitu: internal, eksternal dan pengaruh iklim industri lokal

1. Pertumbuhan Dari dalam (*Internal Growth*)

Faktor ini berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Perusahaan memiliki pengaruh demi kemajuan perusahaan, antara lain besar modal dan proporsi kepemilikannya. *Internal growth* juga menyangkut produktivitas perusahaan tersebut. Semakin meningkat produktivitas perusahaan, maka pertumbuhan perusahaan juga akan meningkat dari waktu ke waktu.

2. Pertumbuhan Dari Luar (*External Growth*)

Perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk menentukan atau mempengaruhi faktor dari luar perusahaan ini, misalnya keadaan politik suatu daerah atau negara, keadaan cuaca dan iklim, karakteristik masyarakat, dan lain-lain.

3. Pertumbuhan Karena Pengaruh Dari Iklim dan Situasi Usaha Lokal

Iklim usaha lokal sangat mempengaruhi baik kinerja maupun pertumbuhan perusahaan dari waktu ke waktu. Faktor-faktor penentu misalnya bagaimana penyedia infrastruktur pendukung kegiatan usaha, apakah daerah tersebut adalah daerah yang menghasilkan atau tidak.

Dalam perusahaan, pertumbuhan yang digolongkan menjadi dua hal yaitu: pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan aset

1. Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan Penjualan merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Pertumbuhan penjualan tinggi akan mencerminkan pendapatan meningkat sehingga pembayaran deviden cenderung meningkat.

2. Pertumbuhan Aset

Pertumbuhan dapat menunjukkan perubahan yang bernilai positif maupun negatif. Apabila terjadi penambahan dari nilai aset diharapkan diikuti dengan meningkatnya hasil operasi perusahaan dan menjadi suatu tanda bahwa perusahaan sedang dalam upaya terus mengembangkan perusahaan.

Pertumbuhan perusahaan merupakan suatu skala untuk mengukur seberapa baik perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya, baik dalam hal industri maupun dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhannya.

Pertumbuhan perusahaan dapat diukur dengan rumus sebagai berikut [20]:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{TotalAktiva}_t - \text{TotalAktiva}_{t-1}}{\text{TotalAktiva}_{t-1}} \quad (2.2)$$

2.1.3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki manajemen. Adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham akan menimbulkan *agency conflict* dan salah satu cara untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen. Kepemilikan manajerial berarti manajemen tidak hanya berperan sebagai agen tetapi juga berperan sebagai pemegang saham, sehingga manajer akan lebih fokus dan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menghasilkan laba. Salah satu cara mengurangi konflik antara prinsipal dan agen dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan manajerial suatu perusahaan. Sebagai seorang pemegang saham pasti akan mendapatkan yang namanya deviden.

Struktur kepemilikan telah menjadi inti dan teori modern perusahaan. Struktur kepemilikan adalah hal memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham dan pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam perusahaan akan memaksa untuk bekerja

lebih giat dalam meningkatkan kinerjanya. Hal ini disebabkan oleh dampak yang akan diterima atas kebijakan yang akan diambil. Baik buruknya kebijakan dan hasil dari kebijakan akan dirasakan oleh manajer [21].

Kepemilikan saham oleh manajer akan mendorong penyatuan kepentingan antara prinsipal dan agen sehingga manajer bertindak sesuai dengan keinginan perusahaan dan dapat meningkatkan ROA perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat mendorong manajer untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan karena setiap keputusan yang diambil akan memberikan manfaat atau jika keputusan yang diambil salah maka manajemen akan bersama-sama menanggung resiko atas kerugian tersebut [22].

Adanya kepemilikan manajer, akan membuat manajer menjadi lebih giat untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan direksi, manajer, komisaris dibagi dengan seluruh saham yang beredar. Kepemilikan manajerial dihitung dengan membandingkan antar jumlah saham yang dimiliki oleh direksi, komisaris dan manajer dengan total saham yang beredar. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Secara sistematis perhitungan kepemilikan manajerial dirumuskan sebagai berikut [22]:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\sum \text{Saham Yang Dimiliki Manajemen}}{\sum \text{Saham Yang Beredar}} \quad (2.3)$$

2.1.4. Kepemilikan Institusional

Salah satu bentuk penerapan dari *Corporate Governance* adalah adanya kepemilikan perusahaan oleh pihak institusional. *Corporate Governance* dapat dijadikan suatu mekanisme oleh pemegang saham dan kreditur untuk mengendalikan tindakan manajer. Mekanisme tersebut dapat berupa mekanisme internal, yaitu struktur kepemilikan, struktur dewan komisaris, kompensasi eksekutif, dan mekanisme eksternal, yaitu pengendalian oleh pasar, kepemilikan institusional, dan pelaksanaan audit oleh auditor eksternal [23].

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi seperti Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), perusahaan swasta, perusahaan efek, dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, dan perusahaan-perusahaan investasi.

Adapun kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham melewati sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Semakin besar kepemilikan institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja keuangan perusahaan akan meningkat. Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan.

Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi berbagai institusional *arrangements* yang diperlukan dalam mendukung kesuksesan implementasi *governance* [24]:

- a. Diperlukan sistem hukum yang andal termasuk sistem pengendalian yang independen dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, pertimbangan yang sehat dan dapat ditegakkan, serta bebas dari intervensi pemerintah dan politik.
- b. Dibutuhkan pasar modal yang *likuid*, memenuhi standar dan kualifikasi internasional serta mendorong munculnya investor institusi.
- c. Ketersediaan lembaga keuangan yang andal, termasuk *stock brokers*, dukungan terhadap proses penambahan saham baru dan *financial advisers*.
- d. Penguatan otoritas regulator pasar keuangan (terutama pasar modal) seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia.
- e. Dorongan untuk memfasilitasi pengungkapan informasi yang komprehensif dengan tingkat transparansi yang semakin tinggi.
- f. Terdapatnya asosiasi profesi akuntan dan asosiasi profesi legal yang memiliki putasi dan diakui secara internasional, mampu untuk mendisiplinkan anggota para klien mereka, dan menjamin kepatuhan terhadap standar akuntansi dan kebutuhan dalam mendukung implementasi CG yang sehat.
- g. Diperlukan akuntan publik yang profesional, andal, dan mampu menjaga independensi profesi dengan klien mereka.
- h. Ketersediaan organisasi profesional seperti BOD/Dewan Komisaris dan Sekretaris Perusahaan dengan kualifikasi tinggi yang relevan.

- i. Ketersediaan lembaga pendidikan profesi yang mampu untuk memberikan pendidikan dan pelatihan dalam bidang CG untuk kualifikasi relevan.
- j. Organisasi konsultan yang mampu dan andal dalam memberikan advis kepada perusahaan dan dewan komisaris.
- k. Tersedianya pelatihan keuangan dan CG serta pengembangan pendidikan profesional yang berkelanjutan.
- l. Ketersediaan hasil riset dan publikasi hasil riset terkait isu CG, baik berupa implikasi kebijakan CG maupun hasil penelitian empirik yang dapat diterapkan.

Kepemilikan institusional mencerminkan modal yang dimiliki bank, dana bersama, dana pensiun, yayasan, sumbangan, perusahaan pribadi, perusahaan asuransi dan tiga lainnya yang memegang dan mempercayakan dana investasinya kepada yang lain. Tingkat kepemilikan institusional tumbuh secara eksponensial melebihi beberapa dekade yang lalu. Dana pensiun yang dimiliki hanya 4% dari modal perusahaan tahun 1960, sekarang memiliki sekitar 23%.

Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan.

Dalam penelitian ini perhitungan kepemilikan institusional dirumuskan sebagai berikut [24]:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Pihak Institusional}}{\text{Total Saham Beredar}} \quad (2.4)$$

2.1.5. Komisaris Independen

Istilah independen sering diartikan sebagai merdeka, bebas, tidak memihak, tidak dalam tekanan pihak tertentu, netral, objektif, punya integritas, dan tidak dalam posisi konflik kepentingan. Namun dalam kaitannya dengan konsep komisaris atau direktur independen, perlu dicermati terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan independen [25].

Dalam kode etik akuntan publik, konteks ini sering dikenal dengan istilah *independent in fact* dan *independent in appearance*. *Independent in fact* menekankan sikap mental dalam mengambil keputusan dan tindakan yang semata-mata didasarkan atas pertimbangan profesionalisme dari dalam diri yang

bersangkutan tanpa campur tangan, pengaruh, atau tekanan dari pihak luar. Sementara itu, *independent in appearance* dilihat dari sudut pandang dari luar yang mengharapkan calon yang bersangkutan (calon auditor, komisaris, atau direktur) secara fisik tidak mempunyai hubungan darah (kepentingan langsung) dengan perusahaan dan/atau dengan para pemangku kepentingan lainnya yang dapat menimbulkan keraguan bagi pihak luar tentang kenetralan yang bersangkutan. Pada pengertian kedua mengenai komisaris dan direktur independen yang telah disebutkan, pengertian tersebut sama dengan pengertian *independent in fact* yang semata-mata didasarkan atas pertimbangan profesionalisme saja. Namun dalam pengertian ketiga, pertimbangan profesionalisme saja tidak cukup; persyaratan *independent in appearance* juga harus dipenuhi [25].

Bila mencermati aturan dari PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 Pasal III.1.6., dijumpai syarat menjadi direktur atau komisaris independen adalah sebagai berikut [25]:

- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendalian Perusahaan tercatat yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) sebelum penunjukan sebagai direktur atau komisaris yang terafiliasi.
- b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris dan Direktur lainnya dari Perusahaan Tercatat.
- c. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain.
- d. Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Perusahaan Tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.

Lemahnya pengawasan yang independen dan terlalu besarnya kekuasaan eksekutif telah menjadi sebagian dari penyebab tumbangannya perusahaan-perusahaan dunia. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap manajemen juga diindikasikan sebagai salah satu penyebab krisis finansial di Asia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pemberdayaan komisaris dengan cara memperkenalkan komisaris independen yang diharapkan akan menjadi penerah *Good Corporate Governance* telah menjadi bagian dari reformasi kehidupan bisnis di Indonesia pascakrisis [26].

Struktur *governance* di Indonesia memisahkan antara dewan komisaris dengan dewan direksi. Jumlah dewan komisaris independen yang disarankan adalah

20% dari jumlah total dewan komisaris yang berasal dari luar pemilik atau kalangan profesional. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Tugas dewan komisaris adalah:

- a. Mengawasi kebijakan dalam menjalankan perusahaan
- b. Memberi nasehat kepada direksi.

Menurut otoritas PT. Bursa Efek Jakarta (Sekarang menjadi PT. Bursa Efek Indonesia), sampai dengan bulan Oktober 2004, sekitar 99% emiten sudah mengangkat komisaris independen. Hanya tinggal sekitar 15 perusahaan saja yang belum menerapkan prinsip *good corporate governance* (GCG) karena belum mengangkat komisaris independen dalam perusahaannya. Pada saat itu, otoritas bursa memberikan batas waktu (toleransi) hingga akhir tahun 2004 kepada perusahaan yang bersangkutan untuk segera mengangkat komisaris independen. Hari ini, apabila masih terdapat perusahaan publik yang belum mengangkat komisaris independen sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, seharusnya PT. Bursa Efek Indonesia memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan tersebut [14].

Dalam kaitannya dengan implementasi *Good Corporate Governance* di perusahaan diharapkan bahwa keberadaan komisaris maupun komisaris independen tidak hanya sebagai pelengkap, karena dalam diri komisaris independen melekat tanggung jawab secara hukum. Oleh karena itu, peranan komisaris independen sangatlah penting. Namun dalam praktik yang selama ini terjadi di Indonesia, terdapat kecenderungan bahwa komisaris sering kali melakukan intervensi terhadap direksi dalam menjalankan tugasnya. Sementara, disisi lain, kedudukan direksi biasanya sangat kuat, bahkan ada direksi yang enggan membagi wewenang serta tidak memberikan informasi yang memadai kepada komisaris. Selain itu, terdapat kendala yang cukup menghambat kinerja komisaris yaitu masih lemahnya kompetensi dan integritas mereka. Hal ini dapat terjadi karena pengangkatan komisaris biasanya hanya didasarkan pada penghargaan, hubungan keluarga, atau hubungan dekat lainnya [26].

Komisaris independen diukur dengan rumus sebagai berikut [27]:

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \quad (2.5)$$

2.1.6. Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai berikut [14]: *“Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan”*.

Tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota komite audit adalah sebagai berikut [25]:

- a. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- b. Terdiri atas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.
- c. Memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- d. Salah satu dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi.
- e. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan/atau non-audit pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan VIII.A.2. tentang Independensi Akuntan yang memberikan jasa audit di Pasar Modal.
- g. Bukan merupakan karyawan kunci Emiten atau Perusahaan Publik dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat Komisaris.
- h. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat

suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.

- i. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten, Komisaris, Direktur, atau Pemegang Saham Utama.
- j. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten.
- k. Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit pada Emiten atau Perusahaan Publik lain pada periode yang sama.
- l. Sekretaris Perusahaan harus bertindak sebagai Sekretaris Komite Audit.

Tugas komite audit adalah sebagai berikut [25]:

- a. Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai (prinsip tanggung jawab).
- b. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan (prinsip transparansi)
- c. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal (prinsip akuntabilitas).
- d. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit (prinsip tanggung jawab).

Jumlah komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan yang tepat oleh komite maka dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Jumlah komite audit diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota komite audit, dengan rumus sebagai berikut [26]:

$$\text{Jumlah Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit} \quad (2.6)$$

2.1.7. Struktur Hutang

Utang merupakan kewajiban yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang bersumber dari dana eksternal baik yang berasal dari sumber pinjaman perbankan, *leasing*, penjualan obligasi dan sejenisnya. Suatu kewajiban adalah mewajibkan bagi perusahaan melaksanakan kewajiban tersebut, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan secara cepat waktu akan memungkinkan bagi suatu perusahaan menerima sanksi dan akibat. Sanksi dan akibat yang diperoleh tersebut berbentuk

yang memberikan pinjaman kepada debitur menginginkan adanya jaminan dari setiap pinjaman tersebut, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan berbagai bentuk aktiva lainnya khususnya aktiva tetap.

Setiap keputusan yang menyangkut dengan pengambilan dan penambahan utang harus dilihat dari 2 (dua) perspektif, yaitu [28]:

- a. Perspektif manajemen perusahaan, dan
- b. Perspektif para pemegang saham.

Dari sudut manajemen perusahaan utang dilihat sebagai sumber dana alternatif yang mampu memberikan solusi bersifat konstruktif, secara jangka pendek dan jangka panjang. Karena harus diingat manajemen perusahaan adalah mereka yang harus memiliki sifat dinamis, kreatif, dan inovatif dalam bekerja termasuk mampu memberikan kenaikan perolehan keuntungan setiap waktunya. Dan memang salah satu tugas utama manajemen perusahaan adalah mampu memberikan kemakmuran maksimal kepada para pemegang saham.

Dari sudut pemegang saham, utang adalah sumber pendanaan eksternal yang lebih disukai karena dua alasan [28]:

1. Bunga atas sebagian besar utang jumlahnya tetap, dan jika bunga lebih kecil daripada pengembalian atas aset operasi bersih, selisih pengembalian tersebut akan menjadi keuntungan bagi investor ekuitas.
2. Bunga merupakan beban yang dapat mengurangi pajak, sedangkan dividen tidak.

Secara umum utang terbagi atas 2 (dua) golongan, yaitu:

1. *Current Liabilities* atau *Short-term Liabilities*

Short term liabilities (utang jangka pendek) sering disebut juga dengan *Current Liabilities* (utang lancar). Penegasan utang lancar karena sumber utang jangka pendek dipakai untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendukung aktivitas perusahaan yang segera dan tidak bisa ditunda. Dan utang jangka pendek ini umumnya harus dikembangkan kurang dari 1 (satu) tahun. Ada beberapa kategori umum yang termasuk dalam utang lancar atau utang jangka pendek adalah:

- a. Utang dagang
- b. Utang wesel
- c. Utang pajak

- d. Utang gaji
- e. Beban yang masih harus dibayar
- f. Dan lainnya

2. *Non Current Liabilities* atau *Long-term Liabilities*

Non Current Liabilities atau *Long-term Liabilities* (utang jangka panjang) sering disebut dengan utang tidak lancar. Penyebutan utang tidak lancar karena dana yang dipakai dari sumber utang ini dipergunakan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka panjang. Alokasi pembiayaan jangka panjang biasanya bersifat *tangible asset* (aset yang bisa disentuh), dan memiliki nilai jual tinggi jika suatu saat dijual kembali. Karena itu penggunaan dana utang jangka panjang ini dipakai untuk kebutuhan jangka panjang, seperti pembangunan pabrik, pembelian tanah, gedung, dan lainnya. Ada beberapa kategori yang termasuk utang jangka panjang yaitu:

- a. Utang obligasi
- b. Wesel bayar
- c. Utang perbankan yang kategori jangka panjang
- d. Dan lainnya.

Dalam penelitian ini perhitungan menggunakan rasio terhadap aset (*Debt to Assets Ratio*). Rasio utang terhadap aset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan terhadap pembiayaan aset. Rasio utang aset didapat dengan membagi total kewajiban dengan total aset yaitu [29]:

$$\text{Debt to Assets Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Aset}} \quad (2.7)$$

2.1.8. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antar lain dengan total aset, nilai pasar saham, dan lainnya [30]. Perusahaan yang berukuran lebih besar memiliki kegiatan/aktivitas yang lebih banyak. Perusahaan besar lebih mudah terlihat dan diawasi dengan sangat baik oleh masyarakat dan pemerintah. Secara rasional

perusahaan berukuran besar lebih mampu mengungkapkan modal intelektual untuk mengurangi kesenjangan informasi dan memenuhi harapan masyarakat serta mematuhi norma yang telah ditetapkan.

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dinyatakan dengan total aset ataupun total penjualan bersih. Semakin besar total aset maupun penjualan aset maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Semakin besar aset maka semakin besar modal yang ditanamkan, sementara semakin banyak penjualan maka semakin banyak juga peputaran uang dalam perusahaan. Perusahaan yang berada pada pertumbuhan penjualan yang tinggi membutuhkan dukungan sumber daya perusahaan yang semakin besar. Sebaliknya, pada perusahaan yang tingkat pertumbuhan penjualannya rendah, maka kebutuhan terhadap sumber daya perusahaan semakin kecil. Karena perusahaan yang berukuran besar dikontrol dengan baik terhadap persaingan ekonominya.

Ukuran perusahaan yang besar diharapkan berbanding lurus dengan laba yang dihasilkan karena aset yang dapat digunakan untuk menghasilkan laba juga semakin besar. Sehingga akan menarik investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan merupakan rata-rata total penjualan bersih dan aset untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun kemudian [30]. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar memiliki risiko yang lebih rendah.

Secara umum, ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar-kecilnya suatu objek. Jika pengertian ini dihubungkan dengan perusahaan atau organisasi. Pada dasarnya, ukuran perusahaan terbagi dalam 3 kategori yaitu [31]:

1. Perusahaan besar (*large firm*)
2. Perusahaan menengah (*medium firm*)
3. Perusahaan kecil (*small firm*).

Secara garis besar, kegiatan operasi itu bisa diwujudkan dalam bentuk usaha sebagai berikut:

- a. Perusahaan perorangan (*proprietorship*).
- b. Perusahaan persekutuan (*partnership*).
- c. Korporasi (*corporation*).

- d. Perusahaan patungan (*joint venture*).
- e. *Holding company*.
- f. *Business trust*.
- g. *Multinational corporation*.

Semua bentuk organisasi usaha seperti ini bisa digunakan untuk beroperasi di luar negeri dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi itu sendiri, untuk tujuan apa operasi di luar negeri ini dilakukan, apakah untuk memasarkan produk, mendapatkan bahan mentah, atau mendapatkan teknologi yang diinginkan.

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut [32]:

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Ln Total Aset} \quad (2.8)$$

2.1.9. *Tax to Book Ratio*

Book-tax Differences merupakan perbedaan jumlah laba yang dihitung berdasarkan akuntansi dengan laba yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan. Pada umumnya, perusahaan yang bergerak dibidang bisnis akan menyusun laporan keuangan untuk 2 (dua) tujuan setiap tahunnya. Tujuan yang pertama ialah pelaporan keuangan sesuai dengan *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) dan kedua yaitu sesuai dengan undang-undang perpejakan untuk menentukan besarnya kewajiban pajak perusahaan yang harus dibayarkan ke pihak regulator dalam hal ini yaitu pemerintah.

Book-tax difference didorong oleh berbagai sumber dan asal-usul. Meskipun ada beberapa faktor yang berbeda yang berpengaruh terhadap kesenjangan pelaporan yaitu kondisi umum dan evolusi terus-menerus GAAP atau hukum perpajakan. Dua faktor yang lebih penting adalah perbedaan tujuan akuntansi komersial dan akuntansi pajak disatu sisi dan dorongan untuk mengelola pendapatan disisi lainnya. Yang belakangan ini berakar pada 2 (dua) fenomena: yang pertama adalah manajemen laba dalam rangka memenuhi harapan atau tolak ukur keuntungan tertentu. Oleh karena itu, manajemen laba mengacu pada kebijakan yang dilakukan dalam akuntansi keuangan untuk mengelola pendapatan pada laporan keuangan dengan atau tanpa mempengaruhi penghasilan kena pajak. Yang kedua adalah perencanaan pajak atau

pelaporan agresif pajak, pengurangan kemampuan pajak secara keseluruhan melalui laporan manuver yang sah atau tidak sah.

Dalam tujuan penyusunan laporan keuangan komersil dibentuk untuk tujuan menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor bisnis, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih dituju untuk menghitung pajak. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya [33].

Laporan laba rugi akuntansi merupakan laporan yang mengukur keberhasilan operasi selama periode waktu tertentu. Pengguna laporan keuangan menggunakan laporan ini untuk menentukan profitabilitas, menilai investasi dan kelayakan kredit atau kemajuan perusahaan melunasi pinjaman. Laporan laba rugi berisi informasi yang diperlukan oleh para investor dan kreditor untuk membantuk mereka dalam pengambilan keputusan [34].

Laporan laba rugi komprehensif adalah laporan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Informasi tentang kinerja perusahaan yang digunakan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas masa depan.

Dalam hal menyajikan perhitungan laba rugi fiskal harus diperhatikan hal berikut:

- a. Harus dipisahkan antara penghasilan dan biaya dalam rangka usaha dengan penghasilan dan biaya di luar usaha.
- b. Harus memuat unsur-unsur penghasilan dan biaya wajib pajak.
- c. Rincian penghasilan dilakukan menurut sifat dan jenis penghasilan rincian biaya dilakukan menurut sifat dan tujuannya.
- d. Disusun dalam bentuk urutan ke bawah.
- e. Laba bersih mencerminkan seluruh pos laba dan rugi selama satu tahun.
- f. Koreksi masalah yang tidak mempengaruhi perhitungan pajak tahunan sebelumnya disajikan sebagai penyesuaian atas saldo laba di tahun berikutnya sehingga tidak memerlukan perbaikan SPT yang lalu.

Dalam peraturan perpajakan di Indonesia mengharuskan perhitungan laba fiskal berdasarkan metode akuntansi yang menjadi dasar perhitungan laba akuntansi.

Sehingga dalam pembuatan laporan keuangan tidak perlu melakukan dua kali pembukuan berdasarkan kedua tujuan pelaporan tersebut. Yang membedakan antara laba akuntansi dengan laba fiskal adalah dengan adanya koreksi fiskal atas laba akuntansi. Hampir semua perhitungan laba akuntansi yang dihasilkan harus mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan penghasilan kena pajak tidak semua ketentuan dalam standar akuntansi keuangan digunakan dalam perpajakan. Dengan kata lain banyak dari ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Dalam hal perbedaan tersebut, ada bersifat sementara (*temporary different*) dan ada yang bersifat tetap (*permanent different*). Atas perbedaan tersebut harus dilakukan suatu tahapan yang disebut rekonsiliasi fiskal, sehingga pada akhirnya dapat diketahui laba fiskal perusahaan [35].

1. Perbedaan Tetap

Perbedaan tetap merupakan suatu konsekuensi yang harus diterima bahwa hal tersebut harus dikeluarkan dari laporan laba rugi karena secara fiskal atau berdasarkan peraturan perpajakan tidak dapat dibebankan atau bukan merupakan penghasilan. Undang-undang NO. 17 tahun 2000 menjelaskan adanya penerimaan yang tidak merupakan objek pajak dan pengeluaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan dividen, bunga royalti sewa, hadiah, penghargaan dan imbalan jasa tertentu yang sudah dikenakan pajak final.
- b. Penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang telah ditetapkan menteri keuangan.
- c. Jumlah imbalan yang melebihi kewajaran yang diberikan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa.
- d. Sanksi perpajakan berupa denda dan bunga. Beban yang berkaitan dengan jamuan.
- e. Pajak penghasilan, dan lainnya.

2. Perbedaan Sementara (*temporary different*)

Menurut PSAK No. 46 paragraf ketujuh, perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau kewajiban dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Perbedaan temporer ini dapat berupa:

- a. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah (*amount*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan (*recovered*). Atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*).
- b. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*).

Tax to book ratio pada penelitian ini diukur dengan menghitung rasio laba fiskal (TI_{it}) terhadap laba sebelum pajak/laba akuntansi ($PTBI_{it}$) yaitu [9]:

$$TaxtoBookRatio = \frac{TI_{it}}{PTBI_{it}} \quad (2.9)$$

Keterangan:

TI_{it} = Laba fiskal/Laba kena Pajak pada perusahaan i tahun t

$PTBI_{it}$ = Laba akuntansi atau Laba Sebelum Pajak pada perusahaan i tahun t

2.1.10. Pajak Tangguhan

Pihak DSAK-IAI mengeluarkan revisi PSAK No. 46 Pajak Penghasilan pada Desember 2010 dan berlaku efektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode laporan dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juli 2012. Pajak penghasilan sesuai dengan PSAK No. 46 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk Pajak Penghasilan, yaitu cara mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk:

- a. Nilai tercatat aset yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat liabilitas yang diakui pada neraca perusahaan.
- b. Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan.

Pajak penghasilan yang diatur dalam PSAK No. 46 merupakan pajak tangguhan. Pajak tangguhan dapat diartikan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pajak tangguhan merupakan bagian yang sulit untuk dipelajari dan dipahami, karena pengakuan pajak tangguhan bisa membawa akibat terhadap berkurangnya laba bersih jika ada

pengakuan beban pajak tangguhan. Sebaliknya, bisa juga berdampak terhadap berkurangnya rugi bersih jika ada pengakuan manfaat pajak penghasilan

Prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan (PSAK No. 46) adalah sebagai berikut:

- a. Pajak penghasilan yang kurang dibayar tahun berjalan atau tertunggak diakui sebagai liabilitas pajak kini (*current tax liability*), sedangkan pajak penghasilan yang lebih bayar tahun berjalan diakui sebagai aset pajak kini (*current tax assets*).
- b. Konsekuensi pajak periode mendatang yang dapat didistribusikan dengan perbedaan temporer kena pajak, sedang efek perbedaan temporer yang boleh dikurangi (*deductible temporary differences*) dan sisa kerugian yang belum dikompensasikan diakui sebagai aset pajak tangguhan.
- c. Pengukuran liabilitas dan aset pajak didasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku, efek perubahan peraturan perpajakan yang akan terjadi dikemudian hari tidak boleh diantisipasi atau diestimasi.
- d. Penilaian (kembali) aset pajak tangguhan harus dilakukan pada setiap tanggal neraca, terkait dengan kemungkinan dapat atau tidaknya pemulihan aset pajak tangguhan direalisasikan dalam periode mendatang.

Beban pajak penghasilan terdiri atas beban pajak kini (dalam tahun berjalan) dan beban pajak tangguhan. Pajak tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang oleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan [35].

Pajak tangguhan memerlukan bagian yang cukup sulit untuk dipelajari dan dipahami, karena pengakuan pajak tangguhan bisa membawa akibat berkurangnya laba bersih jika ada pengakuan beban pajak tangguhan. Sebaliknya bisa juga berdampak terhadap berkurangnya rugi bersih jika ada pengakuan manfaat pajak tangguhan [36].

Apabila pada masa mendatang akan terjadi pembayaran pajak lebih besar maka berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum harus diakui sebagai suatu kewajiban. Kewajiban didefinisikan sebagai suatu kemungkinan adanya pengorbanan ekonomi pada masa yang akan datang yang muncul dari kewajiban masa kini, suatu entitas untuk menyerahkan aset kepada entitas-entitas lainnya sebagai akibat masa

lalu. Apabila ada kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa yang akan datang maka berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum dapat dianggap sebagai suatu aset. Aset didefinisikan sebagai suatu kemungkinan akan adanya manfaat ekonomi pada masa yang akan datang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat atau kejadian pada masa lalu. Besarnya pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan dapat dihitung dengan mengalihkan beda waktu antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal atau rugi fiskal yang dapat dikompensasikan dengan tarif pajak yang berlaku [36].

Apabila ada kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa yang akan datang maka berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum dapat dianggap sebagai suatu aset. Misalnya rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan berdasarkan peraturan perpajakan atau kemungkinan adanya manfaat ekonomi pada masa yang akan datang yang akan mengurangi beban pajak maka dapat diakui sebagai suatu aset pajak tangguhan. Pengakuan aset tangguhan didasarkan pada fakta adanya kemungkinan pemulihan aset mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang menjadi lebih kecil sebagai akibat pemulihan aset yang tidak memiliki konsekuensi pajak [36].

Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa pajak tangguhan merupakan perbedaan antara pengakuan penghasilan dan beban yang terjadi dalam pelaporan keuangan fiskal.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan skala pengukuran Dummy. Dimana jika laporan keuangan menggunakan pajak tangguhan maka diberi nilai 1 (satu) dan sebaliknya jika laporan keuangan tidak menggunakan pajak tangguhan maka diberi nilai 0 (nol).

2.1.11. Struktur Modal

Setiap kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan akan memerlukan pendanaan. Oleh karena itu, apabila dana internal (modal sendiri) yang dimiliki tidak cukup maka perusahaan harus mengupayakan dana yang berasal dari sumber-sumber diluar perusahaan. *Capital Structure* (struktur modal) didefinisikan sebagai komposisi modal perusahaan yang berasal dari sumber utang (kreditur) dan sekaligus porsi modal yang berasal dari modal sendiri (*owners equity*).

Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing diartikan dalam hal ini adalah utang baik jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Sedangkan modal sendiri bisa terbagi atas laba ditahan dan bisa juga dengan penyertaan kepemilikan perusahaan. Struktur modal menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya, sehingga dengan mengetahui struktur modal, investor dapat mengetahui keseimbangan antara risiko dan tingkat pengembalian investasinya. Beberapa teori yang terkait dengan struktur modal yaitu [37]:

1. Modal Modigliani – Miller (MM) Tanpa Pajak

Teori struktur modal yang pertama adalah teori Modigliani dan Miller (MM). Mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak relevan atau tidak memengaruhi nilai perusahaan. MM mengajukan beberapa asumsi untuk mengembangkan teori mereka yaitu:

- a. Tidak terdapat agent cost
- b. Tidak ada pajak
- c. Investor dapat berutang dengan tingkat suku bunga yang sama dengan perusahaan
- d. Investor mempunyai informasi yang sama seperti manajemen mengenai prospek perusahaan di masa depan
- e. Tidak ada biaya kebangkrutan
- f. *Earning Before Interest and Taxes* (EBIT) tidak dipengaruhi oleh penggunaan dari utang
- g. Para investor adalah *price-takes*
- h. Jika terjadi kebangkrutan maka aset dapat dijual pada harga pasar (*market value*).

2. Model Modigliani – Miller (MM) Dengan Pajak

Teori MM tanpa pajak dianggap tidak realistis dan kemudian MM memasukkan faktor pajak kedalam teorinya. Pajak dibayarkan kepada pemerintah, yang berarti merupakan aliran kas keluar. Hutang bisa digunakan untuk menghemat pajak, karena biaya bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Biaya modal saham akan meningkat dengan semakin meningkatnya hutang. Tetapi penghematan pajak akan lebih besar dibanding dengan penurunan nilai karena kenaikan biaya modal. Menggunakan hutang yang lebih banyak, berarti menggunakan modal yang lebih

murah (biaya modal hutang lebih kecil dibandingkan dengan biaya modal saham), sehingga akan menurunkan biaya modal rata-rata tertimbang (meski biaya modal saham meningkat). Teori MM tersebut sangat kontroversial. Implikasi teori tersebut adalah perusahaan sebaiknya menggunakan hutang sebanyak-banyaknya. Dalam praktiknya, tidak ada perusahaan yang mempunyai hutang sebesar itu, karena semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan, akan semakin tinggi juga kemungkinan kebangkrutannya.

3. *Trade-off Theory*

Trade-off Theory dalam menentukan struktur modal yang optimal memasukkan beberapa faktor antara lain: pajak, biaya keagenan (*agency cost*) dan biaya kesulitan keuangan (*financial distress*) tetapi tetap mempertahankan asumsi efisiensi pasar dan *symetric information* sebagai imbalan dan manfaat penggunaan hutang. Tingkat hutang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak mencapai jumlah yang maksimal terhadap biaya kesulitan keuangan (*cost of financial distress*).

4. *Pecking Order Theory*

Teori ini menjelaskan kebijakan perusahaan yang dilakukan untuk mendapatkan tambahan dana dengan menggunakan sumber dana dari dalam atau pendanaan internal daripada pendanaan eksternal. Jika pendanaan eksternal diperlukan, maka perusahaan akan memilih sekuritas yang paling aman seperti obligasi konversi, saham preferen, dan yang terakhir saham biasa. *Pecking order theory* tidak mengindikasikan target struktur modal. *Pecking of theory* menjelaskan urutan pendanaan. Kebutuhan dana ditentukan oleh kebutuhan investasi.

5. *Equity Market Timing*

Baker dan Wugler menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat hutang rendah adalah perusahaan yang menerbitkan *equity* pada saat *market value* tinggi dan perusahaan dengan tingkat hutang tinggi adalah perusahaan yang menerbitkan *equity* pada saat *market value* rendah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur modal adalah sumber pendanaan yang digunakan untuk melakukan investasi di suatu perusahaan. sumber pendanaan tersebut bisa berasal dari modal sendiri atau hutang.

Perhitungan struktur modal menggunakan rasio utang terhadap modal (*Debt to Equity/DER*). Rasio utang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk

mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan total modal, yaitu [38]:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Ekuitas}} \quad (2.10)$$

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan Kinerja Perusahaan sebagai variabel Dependen dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ajeng Asmi Mahaputeri dan L.Kt. Yadnyana (2014)

Ajeng Asmi Mahaputeri dan L. Kt. Yadnyana melakukan penelitian berjudul Pengaruh Struktur Kepemilikan, Kebijakan Pendanaan dan Ukuran Perusahaan Pada Kinerja Perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan kebijakan pendanaan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan [7].

2. Andri Veno (2012)

Andri veno melakukan penelitian berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur *Go Public* (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2011 sampai 2013). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur *Go Public* yang terdaftar di BEI 2011 sampai 2013. Jumlah sampel yang digunakan tahun 2011 sampai 2013 yang memenuhi kriteria adalah 48 perusahaan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel ukuran dewan direksi, total dewan komisaris independen, total dewan komisaris, dan komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Secara parsial variabel ukuran dewan direksi dan komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan variabel total dewan komisaris independen dan total dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan [13].

3. Deby Anastasia Meilic Theacini dan I Gde Suparta Wisadha (2014)

Deby Anastasia Meilic Theacini dan I Gde Suparta Wisadha melakukan penelitian berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance*, Kualitas Laba, dan Ukuran Perusahaan Pada Kinerja Perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2011. Jumlah sampel yang digunakan pada periode 2009-2011 yang memenuhi kriteria adalah 36 perusahaan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel komite audit, dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas laba, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Secara parsial variabel dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas laba, dan ukuran perusahaan berpengaruh pada kinerja perusahaan, sedangkan jumlah komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh pada kinerja perusahaan [10].

4. Desi Aprina

Desi Aprina melakukan penelitian berjudul Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan yang Diukur Menggunakan Economic Value Added. Penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan manufaktur dan non-manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2009-2011. Jumlah sampel yang digunakan dari tahun 2009-2011 yang memenuhi kriteria adalah 84 perusahaan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan, sementara pada ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan kinerja perusahaan [12].

5. Elyzabet I. Marpaung dan Lauw Tjun Tjun (2016)

Elyzabet I. Marpaung dan Lauw Tjun Tjun melakukan penelitian berjudul Pengaruh Pajak Tangguhan dan *Tax to Book Ratio* Terhadap Kinerja Perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2013. Jumlah sampel yang digunakan dari tahun 2011-2013 yang memenuhi kriteria adalah 131 perusahaan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode regresi berganda (*multiple linear regression*

method). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel pajak tangguhan dan *tax to book ratio* tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Secara parsial variabel pajak tangguhan dan *tax to book ratio* tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan [9].

6. Fitriana Warap Sari (2015)

Fitriana Warap Sari melakukan penelitian berjudul Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Struktur Modal Sebagai Pemoderasi. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2011-2013. Jumlah sampel yang digunakan dari tahun 2011-2013 yang memenuhi kriteria adalah 10 perusahaan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan struktur kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan struktur modal sebagai pemoderasi. Secara parsial, variabel struktur kepemilikan dan struktur modal berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Secara moderasi variabel struktur modal mampu memoderasi hubungan struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan [4].

7. I Made Dwi Harmana dan Ketut Alit Suardana (2014)

I Made Dwi Harmana dan Ketut Alit Suardana melakukan penelitian berjudul Pengaruh Pajak Tangguhan dan *Tax to Book Ratio* Terhadap Kinerja Perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2010-2011. Jumlah sampel yang digunakan dari tahun 2010-2011 yang memenuhi kriteria adalah 33 perusahaan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan *tax to book ratio* tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan [8].

8. Melawati, Siti Nurlaela, dan Endang Masitoh Wahyuningsih (2016)

Melawati, Siti Nurlaela, dan Endang Masitoh Wahyuningsih melakukan penelitian berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance*, CSR, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014. Jumlah sampel yang digunakan dari tahun 2012-2014 yang memenuhi kriteria adalah 21 perusahaan. Metode

penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel dewan direksi, dewan komisaris, CSR, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Secara parsial variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, sedangkan variabel dewan direksi, dewan komisaris, dan CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan [6].

9. Melia Agustina Tertius dan Yulius Jogi Christiawan, S.E., M.Si., Ak.

Melia Agustina Tertius dan Yulius Jogi Christiawan, S.E., M.Si., Ak melakukan penelitian berjudul Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor keuangan tahun 2011-2013. Jumlah sampel yang digunakan dari tahun 2011-2013 yang memenuhi kriteria adalah 62 perusahaan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan mempengaruhi ROA. Secara parsial, dewan komisaris dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA [11].

10. Ni Nyoman Ayu Armini dan Dewa Gede Wirama (2015)

Ni Nyoman Ayu Armini dan Dewa Gede Wirama melakukan penelitian berjudul Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Kepemilikan Manajerial Dan Kebijakan Dividen Pada Kinerja Perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. Jumlah sampel yang digunakan dari tahun 2011-2013 yang memenuhi kriteria adalah 304 perusahaan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pertumbuhan perusahaan, kepemilikan manajerial, dan kebijakan dividen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Secara parsial variabel kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan variabel pertumbuhan perusahaan dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan [3].

11. Wempy Singgih Herdiyanto dan Darsono (2015)

Wempy Singgih Herdiyanto dan Darsono melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Struktur Utang Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2011-2013). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2011-2013. Jumlah sampel yang digunakan dari tahun 2011-2013 yang memenuhi kriteria adalah 391 perusahaan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel struktur utang yang diukur dengan rasio total utang (TDA) tahun sekarang, rasio utang jangka pendek (STD) tahun sekarang, rasio utang jangka panjang (LTD) tahun sekarang dan struktur utang yang diukur dengan TDA tahun lalu, STD tahun lalu, dan LTD tahun lalu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Secara parsial struktur utang yang diukur dengan TDA tahun sekarang, STD tahun sekarang, dan LTD tahun sekarang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, sedangkan variabel struktur utang yang diukur dengan TDA tahun lalu, STD tahun lalu, dan LTD tahun lalu tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan [5].

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Yang Diperoleh
Ajeng Asmi Mahaputeri dan L. Kt. Yadnyana (2014)	Pengaruh Struktur Kepemilikan, Kebijakan Pendanaan dan Ukuran Perusahaan Pada Kinerja Perusahaan	Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan Variabel Independen: a. Struktur Kepemilikan a. Kepemilikan Manajerial b. Kepemilikan Institusional b. Kebijakan Pendanaan c. Ukuran Perusahaan	Secara parsial: 1. Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Instiusional berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan. 2. Kebijakan Pendanaan dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan.
Andri Veno (2015)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur <i>Go Public</i> (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2011 sampai 2013)	Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan Variabel Independen: <i>Good Corporate Governance</i> a. Dewan Direksi b. Komisaris Independen c. Total Dewan Komisaris Komite Audit	Secara simultan: variabel ukuran dewan direksi, total dewan komisaris independen, total dewan komisaris, dan komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Secara parsial: a. Variabel ukuran dewan direksi dan komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. b. Variabel total dewan komisaris independen dan total dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Tabel 2.1 Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Yang Diperoleh
Deby Anastasia Meilic Theacini dan I Gde Suparta Wisadha (2014)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Kualitas Laba, dan Ukuran Perusahaan Pada Kinerja Perusahaan	<p><u>Variabel Dependen:</u> Kinerja Perusahaan</p> <p><u>Variabel Independen:</u> <i>a. Good Corporate Governance</i> a. Komite Audit b. Dewan Direksi c. Komisaris Independen d. Kepemilikan Manajerial e. Kepemilikan Institusional b. Kualitas Laba c. Ukuran Perusahaan</p>	<p><u>secara simultan:</u> Variabel komite audit, dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas laba, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.</p> <p><u>Secara parsial:</u> a. Variabel dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas laba, dan ukuran perusahaan berpengaruh pada kinerja perusahaan. b. Variabel jumlah komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh pada kinerja perusahaan.</p>
Desi Aprina	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Insitusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahan yang Diukur Menggunakan Economi Value Added	<p><u>Variabel Dependen:</u> Kinerja Perusahaan</p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. Kepemilikan Manajerial b. Kepemilikan Institutional c. Ukuran Perusahaan</p>	<p><u>Secara parsial:</u> a. Variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. b. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh signfikan terhadap kinerja perusahaan.</p>
Elyzabet I. Marpaung dan Lauw Tjun Tjun (2016)	Pengaruh Pajak Tangguhan dan <i>Tax to Book Ratio</i> Terhadap Kinerja Perusahaan.	<p><u>Variabel Dependen:</u> Kinerja Perusahaan</p> <p><u>Variabel Dependen:</u> a. Pajak Tangguhan b. <i>Tax to Book Ratio</i></p>	<p><u>secara simultan:</u> Variabel pajak tangguhan dan <i>tax to book ratio</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.</p> <p><u>Secara parsial:</u> Variabel pajak tangguhan dan <i>tax to book ratio</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.</p>
Fitriana Warap Sari (2015)	Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Struktur Modal Sebagai Pemoderasi	<p><u>Variabel Dependen:</u> Kinerja Perusahaan</p> <p><u>Variabel Independen:</u> Struktur Kepemilikan</p> <p><u>Variabel Moderasi:</u> Struktur Modal</p>	<p><u>Secara simultan:</u> Variabel struktur kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan struktur modal sebagai pemoderasi.</p> <p><u>Secara parsial:</u> Variabel struktur kepemilikan dan struktur modal berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.</p> <p><u>Secara moderasi:</u> Variabel struktur modal mampu memoderasi hubungan struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan.</p>

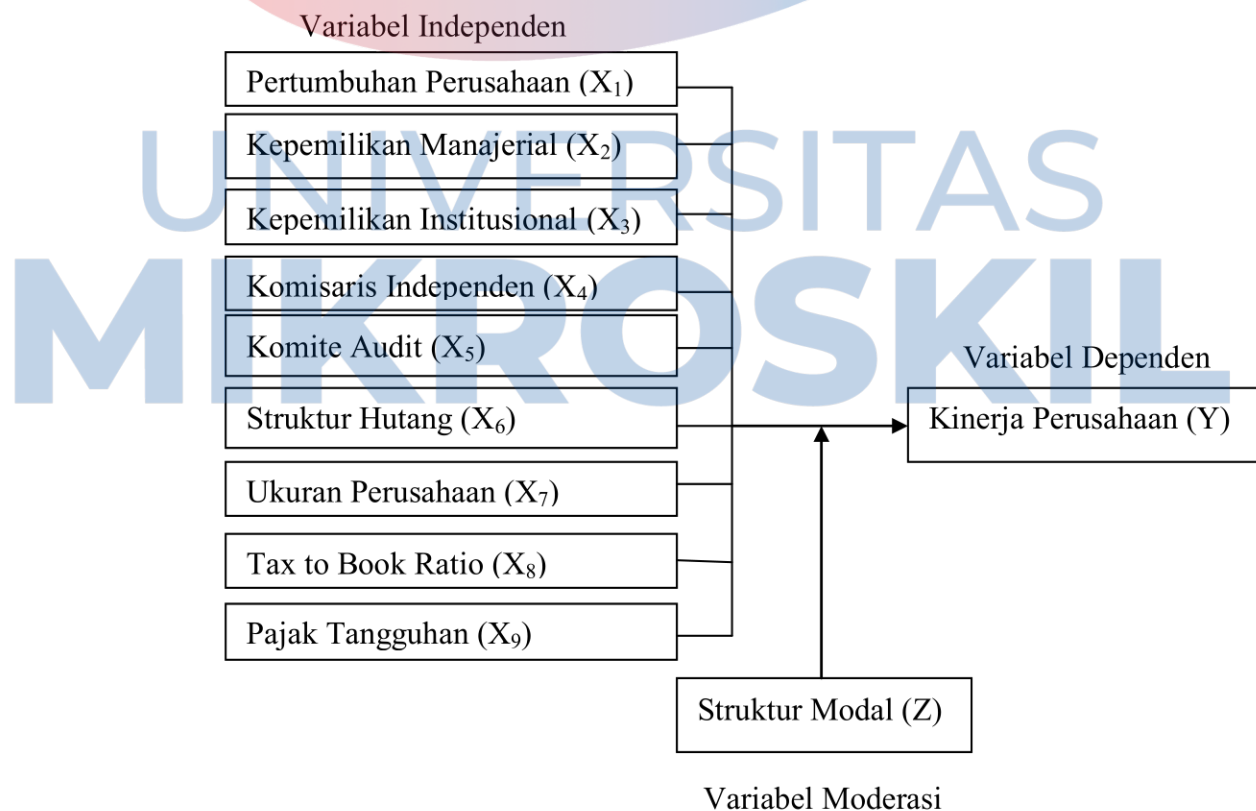
Tabel 2.1 Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Yang Diperoleh
I Made Dwi Harmana dan Ketut Alit Suardana	Pengaruh Pajak Tangguhan dan Tax to Book Ratio Terhadap Kinerja Perusahaan	Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan Variabel Independen: a. Pajak Tangguhan b. Tax to Book Ratio	Secara parsial: a. Variabel pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. b. Variabel <i>tax to book ratio</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
Melawati, Siti Nurlaela, dan Endang Masitoh Wahyuningsih (2016)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , dan CSR, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan	Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan Variabel Independen: a. <i>Good Corporate Governance</i> d. Dewan Direksi e. Dewan Komisaris b. CSR c. Ukuran Perusahaan	Secara simultan: Variabel dewan direksi, dewan komisaris, CSR, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Secara parsial: a. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. b. Variabel ukuran dewan direksi, ukuran komisaris dan corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
Melia Agustina Tertius dan Yulius Jogi Christiawan, S.E., M.Si., Ak.	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan	Variabel Dependen: a. Kinerja Perusahaan Variabel Independen: <i>Good Corporate Governance</i> a. Dewan Komisaris b. Komisaris Independen c. Kepemilikan Manajerial Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan	Secara simultan: Variabel dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan mempengaruhi ROA. Secara parsial: a. Variabel dewan komisaris dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ROA. b. Variabel komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh secara negative dan signifikan terhadap ROA.
Ni Nyoman Ayu Armini dan Dewa Gede Wirama (2015)	Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Kepemilikan Manajerial Dan Kebijakan Dividen Pada Kinerja Perusahaan	Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan Variabel Independen: a. Pertumbuhan Perusahaan b. Kepemilikan Manajerial c. Kebijakan Dividen	secara simultan: variabel pertumbuhan perusahaan, kepemilikan manajerial, dan kebijakan dividen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Secara parsial: a. Variabel kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. b. Variabel pertumbuhan perusahaan dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Tabel 2.1 Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Yang Diperoleh
Wempy Singgih Herdiyanto dan Darsono (2015)	Pengaruh Struktur Utang Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2011-2013)	<p>Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan</p> <p>Variabel Independen: Struktur Utang yang diukur dengan</p> <p>a. Rasio Total Utang (TDA) b. Rasio Utang Jangka Pendek (STD) c. Rasio Utang Jangka Panjang (LTD)</p>	<p>Secara simultan: Variabel struktur utang yang diukur dengan rasio total utang (TDA) tahun sekarang, rasio utang jangka pendek (STD) tahun sekarang, rasio utang jangka panjang (LTD) tahun sekarang dan struktur utang yang diukur dengan TDA tahun lalu, STD tahun lalu, dan LTD tahun lalu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.</p> <p>Secara parsial: a. Variabel struktur utang yang diukur dengan TDA tahun sekarang, STD tahun sekarang, dan LTD tahun sekarang tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. b. Variabel struktur utang yang diukur dengan TDA tahun lalu, STD tahun lalu dan LTD tahun lalu tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.</p>

2.3. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Variabel independen terdiri dari Pertumbuhan Perusahaan (X_1), Kepemilikan Manajerial (X_2), Kepemilikan Institusional (X_3), Komisaris Independen (X_4), dan Komite Audit (X_5), Struktur Hutang (X_6), Ukuran Perusahaan (X_7), *Tax to Book Ratio* (X_8), dan Pajak Tanggihan (X_9). Variabel dependen berupa Kinerja Perusahaan dan Struktur Modal sebagai variabel Moderasi.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan

Pertumbuhan perusahaan dapat didefinisikan sebagai peningkatan yang terjadi pada suatu perusahaan. Suatu perusahaan yang berada dalam industri yang mempunyai laju pertumbuhan tinggi harus menyediakan modal yang cukup untuk membiayai belanja perusahaan. Dengan demikian, ketika suatu perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi dan semakin meningkat maka mengisyaratkan adanya kebutuhan pendanaan lebih besar pula [3].

Hal tersebut merupakan indikasi yang menunjukkan perusahaan memiliki prospek yang menguntungkan di masa depan. Peningkatan pertumbuhan perusahaan berarti kinerja perusahaan juga meningkat. Peningkatan kinerja perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan dan diikuti dengan meningkatnya kemakmuran pemegang saham.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1a} : Variabel pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

2.4.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Perusahaan

Kepemilikan Manajerial berarti kepemilikan saham oleh pihak manajemen dan seluruh modal saham perusahaan yang di kelola. Teori agensi saham dimiliki sepenuhnya oleh pemilik (pemegang saham) dan manager (agen) diminta untuk memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang saham.

Hal ini dapat dikatakan bahwa apabila tingkat pengembalian pemegang saham dilakukan dengan maksimal maka hal itu menunjukkan kinerja suatu perusahaan bagus. Semakin bagus kinerja suatu perusahaan. Maka akan banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Hasil

penelitian tersebut menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan [10].

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1b} : Variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

2.4.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi seperti Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), perusahaan swasta, perusahaan efek, dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, dan perusahaan-perusahaan investasi. Adapun kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham melewati sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen.

Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Semakin besar kepemilikan institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan [10].

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1c} : Variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

2.4.4. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kinerja Perusahaan

Komisaris independen adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Yang diartikan sebagai kepentingan perusahaan adalah kepentingan bagi seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham mayoritas ataupun pemegang saham minoritas [25].

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa apabila perusahaan ini mendapatkan kinerja yang baik. Maka perusahaan harus membenahi kepentingan perusahaan

dalam hal latar belakangnya. Kepentingan perusahaan terdiri dari seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1d} : Variabel komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

2.4.5. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal [25].

Jumlah komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam proses pengambilan keputusan. Dengan pengambilan keputusan yang tepat oleh komite maka dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan [13].

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1e} : Variabel Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

2.4.6. Pengaruh Struktur Hutang Terhadap Kinerja Perusahaan

Utang merupakan kewajiban yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang bersumber dari dana eksternal baik yang berasal dari sumber pinjaman perbankan, *leasing*, penjualan obligasi dan sejenisnya. Suatu kewajiban adalah mewajibkan bagi perusahaan melaksanakan kewajiban tersebut, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan secara cepat waktu akan memungkinkan bagi suatu perusahaan menerima sanksi dan akibat.

Sumber dana alternatif yang mampu memberikan solusi bersifat konstruktif, secara jangka pendek dan jangka panjang merupakan utang yang dilihat dari sudut manajemen perusahaan. Karena manajemen perusahaan adalah mereka yang harus memiliki sifat dinamis, kreatif, dan inovatif dalam bekerja termasuk mampu memberikan kenaikan perolehan keuntungan setiap waktunya sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan [28]. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa struktur hutang berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan [5].

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1f} : Variabel struktur hutang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

2.4.7. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan dari total aktiva yang dimiliki. Semakin besar total aktiva maka besar pula ukuran suatu perusahaan. Terlihat bahwa ukuran perusahaan yang besar mempunyai sumber daya yang besar untuk melakukan pengungkapan lebih luas dan mampu membiayai penyedia informasi untuk kepentingan internal yang menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal sehingga tidak memerlukan tambahan biaya yang besar. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan [10].

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1g} : Variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

2.4.8. Pengaruh *Tax to Book ratio* Terhadap Kinerja Perusahaan

Tax to book ratio merupakan perbandingan antara rasio penghasilan kena pajak atau taxable income terhadap laba akuntansi atau *book income*. Dimana laba akuntansi disusun berdasarkan pada standar akuntansi keuangan (SAK), sedangkan untuk penghasilan kena pajak disusun berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. *Tax to book ratio* merupakan salah satu dari sekian banyak rasio yang digunakan untuk melakukan manajemen pajak. Yang bertujuan untuk melakukan pengamatan pembayaran pajak. Kaitan antara *tax to book ratio* dengan kinerja perusahaan pihak manajemen perusahaan biasanya cenderung memaksimalkan perolehan jumlah laba akuntansi, dengan maksud tertentu, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan yang dicapai pada periode tersebut maksimal. Namun hal tersebut tidak dilakukan untuk pembayaran pajak. Pihak perusahaan cenderung untuk meminimalkan perolehan jumlah laba akuntansi, sehingga perolehan laba fiskal pun mengalami penurunan. Yang berdampak pada penghematan pembayaran pajak. Maka hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan yang dicapai pada periode tersebut mengalami penurunan [33].

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1h} : Variabel *tax to book ratio* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

2.4.9. Pengaruh Pajak Tangguhan terhadap Kinerja Perusahaan

Pajak tangguhan merupakan dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa datang. Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa datang. Bila dampak pajak di masa datang tersebut tidak tersaji dalam neraca dan laba rugi, maka laporan keuangan bisa saja menyesatkan pembacanya. Adanya suatu perencanaan pajak tangguhan yang baik dapat membantu kinerja perusahaan. Semakin besar pajak tangguhan maka akan semakin baik kinerja perusahaan. Ketika perusahaan mampu melakukan manajemen pajak tangguhan yang baik, dapat membantu untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1i} : Variabel pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

2.4.10. Kemampuan Struktur Modal Dalam Memoderasi Hubungan Pertumbuhan Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Struktur Hutang, Ukuran Perusahaan, *Tax to book ratio* dan Pajak Tangguhan dengan Kinerja Perusahaan.

Struktur modal merupakan pendanaan yang bersumber dari luar, berupa utang dan modal yang akan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dalam tujuan untuk memperoleh laba. Proporsi struktur modal digunakan untuk menentukan pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan, dimana dana yang diperoleh menggunakan kombinasi atau paduan sumber yang berasal dari dana jangka panjang.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_2 : Variabel struktur modal mampu memoderasi hubungan pertumbuhan perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite

audit, struktur hutang, ukuran perusahaan, *tax to book ratio* dan pajak tangguhan dengan kinerja perusahaan.



UNIVERSITAS MIKROSKIL